

Evaluasi Kebijakan Pembinaan Posyandu oleh Kelompok Kerja Operasional (Pokjandal) Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Timur)

Evaluation of the Implementation of Posyandu (Integrated Service Center) Development Policy by Operational Working Group (Pokjandal) City of Banjarmasin South Kalimantan Province (Case Study in The District of East Banjarmasin)

Anggrita Sari, Lucia Ratna Kartika Wulan, Tjahjono Kuntjoro

AKBID Sari Mulia Banjarmasin

Alamat: Jl. Pramuka No 2 Banjarmasin

HP. 085228257978, sarianggrita @ yahoo.co.id

ABSTRAK

Sejak tahun 2010 di Kecamatan Banjarmasin Timur telah ditetapkan pengurus Pokjandal kecamatan berdasarkan SK No 10/2010 tentang pengurus Pokjandal kecamatan, tetapi masih ditemukan bahwa peran dan fungsinya belum berjalan secara maksimal.. Tujuan penelitian ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan Posyandu oleh Pokjandal yang dilihat dari aspek *output*, *Input* dan proses pembinaan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan waktu *cross sectional*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam pada 4 orang pengurus Pokjandal kecamatan sebagai Informan utama, dan 10 orang sebagai informan triangulasi. Analisa data menggunakan metode *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan Pokjandal kecamatan secara organisatoris sudah dibentuk, tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan dari aspek *output* ditemukan tidak ada kelengkapan data dan Informasi, tidak pernah dilakukan analisis masalah dan intervensi, tidak pernah menyusun rencana tahunan dan penjadwalan kegiatan pembinaan, kegiatan koordinasi dan laporan hasil kegiatan tidak pernah dilakukan. Aspek *Input* dilihat dari SDM, Sarana/prasarana serta Pendanaan tidak berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya dalam pembinaan Posyandu dan aspek proses berupa pengumpulan data, informasi dan analisis masalah tidak pernah dilakukan. Penyusunan rencana tahunan, pemantauan serta evaluasi kegiatan juga tidak berjalan sesuai dengan fungsinya karena tidak ada sosialisasi dan petunjuk teknis yang dijadikan pedoman kerja sehingga tidak ditemukan dokumen laporan kegiatan Pokjandal.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah tidak berfungsinya organisasi Pokjandal dilihat dari aspek *output* bahwa kegiatan pembinaan Posyandu belum berjalan, aspek *input* tidak berfungsi sesuai perannya dan aspek proses tidak dilakukan sesuai dengan pedoman Pokjandal. Saran yang dapat diberikan adalah perlu komitmen dan ketegasan dari *stakeholder* serta perlu optimalisasi koordinasi dan komunikasi lintas sektor dan program.

Kata kunci: evaluasi, kebijakan, pembinaan Posyandu, Pokjandal

ABSTRACT

Since 2010, in East Banjarmasin sub-district, members of sub-district operational team work (pokjanal) had been established based on the decree no. 10/2010 regarding sub-district Pokjanal board member. The role and function of this pokjanal was not maximal. Objective of this study was to evaluate the implementation of posyandu supervision by pokjanal based on supervision output, input, and process aspects.

This was a descriptive-qualitative study with cross sectional approach. Data collection was done using in-depth interview technique on four sub-district pokjanal board members as main informants. Triangulation informants consisted of ten people. Content analysis was applied in the data analysis. Results of the study showed that sub-district pokjanal was established. However, based on evaluation on output aspect, it was found that completeness of data and information were insufficient; problem analysis and intervention were not done; annual planning and supervision activity schedule formulation were not performed; coordination activity and report of activities results were not done. Input aspect: human resource, facilities, and funding were not provided according to the role and function of pokjanal in implementing the supervision. Process aspect: data collection, information, and problem analysis were not done. Annual plan formulation, monitoring and activity evaluation were not implemented according to pokjanal function. This was caused by no socialization and technical guidance that could assist the work of pokjanal; therefore, no pokjanal activity report documents were found.

Conclusion of this study was that Pokjanal organization did not function properly. Reasons for this condition could be viewed from output aspect: posyandu supervision activity was not done; input aspect: Pokjanal did not function according to their role; process aspect was not implemented according to the pokjanal guideline.

It is suggested that stakeholder commitment and clarity are needed; cross sectors and cross programs coordination and communication should be optimized.

Keywords : Evaluation, policy, posyandu supervision, pokjanal

PENDAHULUAN

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat.¹ Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar serta dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.² Keberadaan Posyandu yang tersebar luas di seluruh pelosok tanah air dan merupakan salah satu jenis pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki nilai strategis untuk dikelola dan dikembangkan secara maksimal karena dianggap sebagai ujung tombak kegiatan terpadu yang ada di masyarakat.^{3,4} Untuk mendukung koordinasi dan operasional Posyandu, maka Menteri Dalam Negeri membuat suatu kebijakan yang tertuang

dalam Instruksi Mendagri No 9/1990 tentang peningkatan pembinaan mutu Posyandu di tingkat desa/kelurahan yang salah satunya mengatur struktur organisasi dan kelompok kerja operasional (Pokjanal) di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54/ 2007 tentang Pedoman pembentukan kelompok kerja operasional pembinaan pos pelayanan terpadu (Posyandu),⁵ dan dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19/2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu.⁶

Kegiatan Posyandu di tingkat kecamatan juga banyak melibatkan *stakeholder* dan *decision maker*; demikian pula halnya di tingkat desa atau kelurahan.⁷ Posyandu di tingkat lapangan tidak lepas dari peranan petugas kesehatan, tetapi pelaksanaan dan pengorganisasian kegiatan dilakukan oleh masyarakat. Paradigma

pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya kesadaran yang dimiliki masyarakat untuk membuat olahan dan keputusan dari dan untuk masyarakat sendiri.^{5,6,11}

Rumusan Masalah: Berdasarkan latar belakang dan studi pendahuluan maka perumusan masalah diuraikan sebagai berikut: pelaksanaan kegiatan Posyandu belum berjalan dengan baik, hal ini bisa tergambar dari tingkat kemandirian Posyandu yang masih rendah hanya 11,1% dibanding target SPM adalah 40 %. Hal ini ditunjukkan dengan data pencapaian cakupan indikator kinerja Posyandu yang ditetapkan masih rendah dibanding dengan target SPM 80% untuk D/S, N/D, N/S dan K/S sedangkan pencapaian Kota Banjarmasin hanya 68,10% dan Kecamatan Banjarmasin Timur masih di bawah rerata pencapaian Kota Banjarmasin . Pokjnal Kecamatan Banjarmasin Timur sudah terbentuk sejak tahun 2010 yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Posyandu agar bisa melaksanakan pelayanan secara maksimal. Dari uraian tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian tentang “Evaluasi Kebijakan Pembinaan Posyandu oleh Pokjnal Kota Banjarmasin studi kasus di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.

Tujuan Umum penelitian ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Pokjnal Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Timur dalam pembinaan Posyandu.

Tinjauan teoritis: Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu evaluasi kebijakan publik dimaksud untuk mengukur tingkat kinerja pelaksanaan suatu kebijakan publik serta proses pelaksanaan kebijakan dilaksanakan melalui petunjuk teknis atau pelaksanaan. Pada kebijakan Pokjnal Posyandu sesuai dengan ketetapan Mendagri No 54/2007 untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan teori sistem untuk menjelaskan aspek *Output* yaitu kelengkapan dokumen, hasil analisis masalah, rencana tahunan dari Pokjnal kecamatan, frekuensi pembinaan, program tahunan, frekuensi pembinaan dan tindak lanjut, kegiatan kordinatif, serta laporan hasil kegiatan yang

dilakukan oleh Pokjnal Kecamatan Banjarmasin Timur ke Walikota. Menjelaskan aspek *input* yaitu ketenagaan, sarana/prasarana dan dana. Menjelaskan aspek proses yang meliputi kegiatan pengumpulan dan penyampaian data/informasi, pelaksanaan analisis masalah, penyusunan rencana tahunan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penggerakan dan pengembangan partisipasi masyarakat dan pelaporan kegiatan ke pejabat terkait.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan rancangan studi kasus. Sasaran penelitian adalah pengurus Pokjnal Kecamatan Banjarmasin Timur. Yang berjumlah 4 orang sebagai informan utama. Informan triangulasi terpilih adalah: 1 orang Pengurus Pokjnal Kota Banjarmasin, 1 orang kelompok kerja (Pokja) di tingkat kelurahan, 1 orang kader Posyandu, 6 orang tenaga kesehatan dari Puskesmas serta 1 orang Ibu Balita yang ada di Posyandu.

Variabel yang diteliti meliputi: Aspek *Output* terdiri dari: Kelengkapan dokumen kegiatan, hasil analisis masalah, program rencana tahunan & penjadwalan kegiatan, kegiatan koordinasi & laporan kegiatan pembinaan, Laporan hasil kegiatan ke kotamadya. Aspek *Input* terdiri dari: SDM, Sarana & Prasarana, pendanaan. Aspek Proses yaitu kegiatan pembinaan dan pengawasan yaitu: pengumpulan dan penyampaian data/ Informasi serta analisis masalah, penyusunan rencana tahunan dan jadwal pembinaan Posyandu, kegiatan koordinasi dan pelaporan kegiatan ke pejabat terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi terhadap kegiatan pelaksanaan Posyandu di wilayah kecamatan Banjarmasin Timur. Prosedur analisis data dengan analisis isi (*content analysis*) yang meliputi pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), verifikasi (*conclusion drawing*).

HASIL

1. Kebijakan Posyandu di Kecamatan Banjarmasin Timur

Hasil penelitian menunjukkan tidak ditemu-

kannya dokumen berupa kebijakan tertulis seperti peraturan daerah, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta peraturan yang terkait, yang memiliki daya dukung terhadap kebijakan pembinaan Posyandu oleh Pokjanal.

2. Aspek Output kegiatan pembinaan

Pokjanal Posyandu kecamatan Banjarmasin Timur secara organisatoris sudah terbentuk. Akan tetapi pada analisisnya tentang pembentukan organisasi Pokjanal Posyandu kota Banjarmasin menunjukkan banyak kelemahan antara lain tim yang ada di organisasi tersebut belum memahami fungsi & tugasnya dalam Pokjanal kecamatan. Kelengkapan *output* data pada penelitian ini tidak ditemukan karena organisasi belum berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya.

3. Ketersediaan aspek input

Sumber daya manusia (SDM) dalam kelompok kerja operasional pembinaan Posyandu di Kecamatan Banjarmasin Timur sudah ada dalam struktur organisasi yang berjumlah 7 orang. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan masih belum dilaksanakan karena belum pernah dilakukan sosialisasi dan pelatihan. Sarana dan prasarana kegiatan masih belum memadai masih sangat tergantung dari strata Posyandu dan keaktifan kader dari masing-masing Posyandu. Sumber dana untuk kegiatan Posyandu masih sangat tergantung pada bantuan pemerintah melalui kelurahan dan juga Puskesmas sedangkan Pokjanal kecamatan masih belum mempunyai anggaran untuk melaksanakan pembinaan Posyandu.

4. Pelaksanaan aspek proses

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum pernah dilakukan penyusunan rencana tahunan dan penjadwalan kegiatan pembinaan Posyandu. Sedangkan untuk kegiatan koordinasi dan laporan hasil kegiatan yang disusun Pokjanal juga belum ada. Untuk kegiatan Posyandu di wilayah kecamatan Banjarmasin Timur laporan tahunan di susun oleh PKK kecamatan. Kegiatan koordinasi dan laporan kegiatan pembinaan Posyandu oleh Pokjanal tidak ditemukan dalam bentuk dokumen ataupun laporan kegiatan pembinaan Posyandu oleh Pokjanal.

PEMBAHASAN

Peranan Pokjanal Posyandu sangat penting terutama sebagai wadah koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam melaksanakan pembinaan secara komprehensif. Hal ini sesuai dengan tujuan umum dari Pedoman Umum Pokjanal Posyandu, yaitu untuk meningkatkan kualitas fungsi koordinasi dan pemantapan kapasitas kinerja Pokjanal Posyandu di Pusat dan daerah dalam rangka pembinaan program Posyandu seperti yang ditetapkan dalam Permendagri No 54/2007 yang menjadi pedoman pembentukan Pokjanal dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Menurut Ryans sistem adalah gabungan dari elemen-elemen yang saling dihubungkan oleh suatu proses atau struktur dan fungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam upaya menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan. Sehingga dalam suatu manajemen sangat berhubungan erat dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggerakkan orang dan sumber lain yang tersedia dan berfungsi dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.^{7,8,9} Kegiatan Posyandu di tingkat kecamatan juga banyak melibatkan *stakeholder* dan *decision maker*, demikian pula halnya di tingkat desa atau kelurahan.¹⁰ Posyandu di tingkat lapangan tidak lepas dari peranan petugas kesehatan, tetapi pelaksanaan dan pengorganisasian kegiatan dilakukan oleh masyarakat. Paradigma pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya kesadaran yang dimiliki masyarakat untuk membuat olahan dan keputusan dari dan untuk masyarakat sendiri.^{9,14} Adapun kelembagaan yang mengkoordinasikan fungsi pembinaan dari pemerintah itu, diorganisasikan melalui wadah Kelompok Kerja Operasional Posyandu (Pokjanal Posyandu). Di desa/kelurahan dikoordinasikan melalui Pokja Posyandu. Fungsi pembinaan tersebut meliputi 3 aspek manajemen, yaitu aspek program, aspek kelembagaan dan aspek personil atau sumber daya manusia pengelola Posyandu. Unsur-unsur yang duduk dalam pengorganisasian Pokjanal/Pokja Posyandu tidak terbatas pada komponen instansi pemerintah saja, tetapi juga dapat melibatkan unsur-unsur lain seperti lembaga profesi,

perguruan tinggi, LSM, swasta/dunia usaha dan sebagainya. Tetapi dalam penelitian ini masih belum dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsinya. Hal ini dapat dipengaruhi karena masih lemahnya koordinasi dan komitmen dari semua unsur yang terkait dengan kegiatan Pokjnal Posyandu seperti yang ditetapkan dalam Permendagri No 54/2007. Tujuan pengorganisasian Pokjnal/Pokja Posyandu adalah untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pembinaan yang berkaitan dengan peningkatan fungsi dan kinerja Posyandu, yang secara operasional dilaksanakan oleh unit atau kelompok pengelola Posyandu di desa, melalui mekanisme pembinaan secara berjenjang oleh Pokjnal Posyandu di daerah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang evaluasi kebijakan pembinaan Posyandu oleh Pokjnal (kelompok kerja operasional) Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Aspek *output* kegiatan.

- a. Kelengkapan data kegiatan Posyandu Pokjnal kecamatan Banjarmasin Timur tidak memiliki data tentang pembinaan Posyandu yang sudah dilakukan, karena belum berfungsinya Pokjnal kecamatan.
- b. Analisis masalah dan intervensi yang dilakukan oleh Pokjnal Kecamatan Banjarmasin Timur Analisis masalah dan intervensi belum pernah dilakukan oleh Pokjnal kecamatan karena belum berfungsinya organisasi. Sedangkan bila dalam kegiatan Posyandu ada menemukan masalah untuk operasional kegiatan, akan selalu didiskusikan dengan petugas Puskesmas yang rutin datang pada setiap kegiatan Posyandu.
- c. Rencana Tahunan dan jadwal kegiatan untuk melakukan pembinaan Posyandu Tidak ditemukan rencana tahunan dan jadwal kegiatan yang dilakukan untuk membina Posyandu karena organisasi Pokjnal kecamatan belum berfungsi, selama ini kegiatan Posyandu dikoordinir oleh pihak Puskesmas untuk memberikan pelayanan pada setiap kegiatan Posyandu.
- d. Kegiatan koordinasi dan laporan hasil

kegiatan pembinaan oleh Pokjnal Kecamatan Banjarmasin Timur.

Kegiatan terpadu yang dilakukan bersama tim Pokjnal kecamatan belum pernah dilaksanakan. Pihak PKK kecamatan hanya akan datang ke kegiatan Posyandu bila ada kegiatan lomba dari tingkat kota Banjarmasin atau Provinsi Kalimantan Selatan seperti persiapan lomba kader, lomba Balita, atau Posyandu yang biasanya pihak PKK kecamatan datang untuk memberikan arahan dan petunjuk kegiatan serta informasi yang berkaitan dengan lomba tersebut. Bentuk laporan yang dilakukan di Posyandu disesuaikan dengan kebutuhan petugas Puskesmas. Sedangkan laporan hasil kegiatan Pokjnal selama 2 tahun ini, dalam kegiatan pembinaan Posyandu tidak pernah dilaporkan ke Walikota Banjarmasin.

2. Ketersediaan Aspek Input

- a. SDM Secara organisatoris Pokjnal Kecamatan Banjarmasin Timur sudah di bentuk, tetapi kenyataan dilapangan sekretariat ini tidak berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya seperti yang tertera dalam pedoman Pokjnal Posyandu untuk melakukan pembinaan Posyandu. Bila dilihat dari kualifikasi SDM dan kompetensi yang masih dirasakan bahwa pengurus tersebut belum memahami tentang tugas dan tanggungjawabnya karena tidak ada petunjuk teknis dan sosialisasi tentang Pokjnal Posyandu yang ada di kecamatan. Hal inilah yang menjadi kendala yang dirasakan oleh pengurus Pokjnal karena lemahnya koordinasi dan komunikasi serta sumber daya yang kurang mendukung untuk melaksanakan pembinaan Posyandu oleh pokjnal kecamatan Banjarmasin Timur.
- b. Sarana dan Prasarana Kesehatan Sarana dan prasarana dilihat dari ketersediaan, kecukupan, dan kelayakan untuk melakukan kegiatan Posyandu masih belum memadai. Pokjnal Posyandu belum pernah melakukan pembinaan kepada Posyandu di wilayah kecamatan Banjarmasin Timur. Sehingga untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan Posyandu, kader

mengusulkan ke Puskesmas dan juga kelurahan.

c. Pendanaan

Terkait dengan pendanaan, tidak ada anggaran khusus yang secara rutin diterima oleh Pokjnal kecamatan Banjarmasin Timur hal ini dikarenakan kesekretariatan Pokjnal Posyandu ini tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

3. Pelaksanaan Aspek Proses

a. Pengumpulan, penyampaian data dan informasi serta analisis masalah.

Tidak ada ketentuan yang di jadikan petunjuk teknis tentang tugas dan fungsi pokjnal kecamatan dalam mengumpulkan data da informasi tentang Posyandu. Hal ini disebabkan karena tidak ada diberikan dan disosialisasikan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman oleh pengurus Pokjnal untuk melaksanakan peran dan fungsinya dalam menjalankan Pokjnal Posyandu tingkat kecamatan Banjarmasin Timur.

b. Penyusunan rencana tahunan serta jadwal pembinaan Posyandu

Pokjnal Posyandu kecamatan Banjarmasin Timur karena belum berfungsi dan berperan sesuai dengan tugas dan perannya seperti dalam pedoman Pokjnal, sehingga kegiatan penyusunan rencana tahunan serta jadwal pembinaan Posyandu tidak pernah dilakukan.

c. Kegiatan koordinasi dan laporan kegiatan pembinaan oleh Pokjnal serta pelaporan kegiatan Pokjnal.

Dalam kegiatan koordinasi Posyandu, yang dilakukan Pokjnal Posyandu tidak ada karena memang Pokjnal Posyandu ini belum berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya. Serta tidak ada ditemukan laporan yang berhubungan dengan kegiatan Pokjnal Posyandu.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dikemukakan antara lain:

1. Bagi pemerintah kota Banjarmasin

Diharapkan segera mensosialisasikan kebijakan pembinaan Posyandu oleh Pokjnal

yang sudah menjadi ketetapan pemerintah dari tingkat kotamadya sampai dengan kelurahan, kerana masih banyak tidak diketahui oleh berbagai pihak. Upaya yang lain dapat segera diperhatikan aspek *input* kebijakan khususnya SDM, dana dan sarana/prasarana sebagai pelaksana kegiatan. Perlu ada pengawasan langsung oleh pimpinan untuk koordinasi lintas program dan lintas sektor, agar kelompok kerja operasional Posyandu dapat melaksanakan fungsinya melakukan pembinaan terhadap Posyandu. Serta diperlukan ketegasan dan komitmen dari semua unsur *stakeholder* untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Bagi kecamatan

a. Dukungan pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang pembinaan Posyandu sangat diperlukan. Koordinasi lintas sektor dan program sangat diperlukan sehingga tidak terkesan berjalan sesuai kepentingan masing-masing.

b. Perlu optimalisasi koordinasi antara kecamatan dan Puskesmas untuk meningkatkan peranan pembinaan dalam menjalankan fungsi Pokjnal Posyandu kecamatan.

c. Membentuk Pokjnal Posyandu di tingkat kecamatan dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Pokjnal Posyandu serta dalam menetapkan struktur organisasi berdasarkan atas kompetensi dan masukan dari berbagai pihak yang berpengalaman sehingga tidak terjadi kebingungan setelah ditetapkan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang ada dalam organisasi.

d. Mengaktifkan peran serta masyarakat dengan kreatifitas dan inovasi agar tumbuh kesadaran bahwa Posyandu adalah wadah peran serta masyarakat dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

3. Bagi Puskesmas

a. Perlu optimalisasi koordinasi antara Puskesmas dan kecamatan untuk meningkatkan peranan petugas dalam menjalankan peran dan fungsi pembinaan Posyandu dalam wilayah kerja Puskesmas.

b. Pembinaan secara terus menerus terhadap

kader Posyandu untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan Posyandu.

KEPUSTAKAAN

1. Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Umum Pengelolaan posyandu*. Jakarta: 2011.
2. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri RI. *Pedoman Umum Manaiemen Pokjandal Posyandu*. Jakarta: 2004.
3. Depkes RI. *Petunjuk teknis Gerbang Mas Posyandu di Tingkat Kab/Kota*, Jakarta: 2007.
4. Menteri Dalam Negeri No 54/2007. *Pedoman Pembentukan Pokjandal Pembinaan Posyandu Terpadu*. Jakarta: 2007.
5. Menteri Dalam Negeri No 19/2011. *Pedoman Pengintegasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu*. Jakarta: 2011.
6. Departemen Dalam Negeri RI. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor :9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)*. Jakarta: 1990.
7. Nugroho, R. *Public Policy Teori Kebijakan; Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi,, Revisi, Risk Manajemen dalam Kebijakan Public Kebijakan dalam Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan* : 2008.
8. Widodo, J. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media: 2008.
9. Dunn, WN. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta: 2000
10. Miles, M. dan Huberman, A.M. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia (UI-press). Jakarta: 1992
11. Muhadjir, HN. *Kebijakan dan Perencanaan Sosial Pengembangan Sumber Daya Manusia Telaah Cross Discipline*. Rake Sarasin. Yogyakarta: 2000.
12. Moleong, L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya: 2004.
13. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* Alfabeta. Bandung: 2000
14. Sulaeman, ES. *Manajemen Kesehatan Teori & Praktik di Puskesmas*, Gadjah mada University press, Yogyakarta: 2009